



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : PUSAT JASA KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : PUSAT JASA KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SUROWO**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT JASA KEARSIPAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**
3. NHK : **96747**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 430.843.000

1. Tanah Seluas 122 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 40.870.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 45.432.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/21 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 45.432.000
4. Tanah Seluas 557 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 299.109.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 178.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 737.343.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 737.343.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.